

**DAMPAK KONFLIK POLITIK TERHADAP MATA
PENCAHARIAN MASYARAKAT**
*(Studi Kasus Karyawan PT. GRUTI di Desa Sarah Teube
Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur
Nanggroe Aceh Darussalam)*

SKRIPSI

Oleh :

**ASNAN HAPPY
04 192 017**



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

ABSTRAK

ASNAN HAPPY (04 192 017). Dampak Konflik Politik Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat. Studi Kasus: Karyawan PT. GRUTI di Desa Sarah Teube Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Nanggroe Aceh Darussalam. Skripsi Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2011.

Desa Sarah Teube terletak di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perubahan mata pencaharian terjadi seiring terjadinya konflik politik yang mengakibatkan ditutupnya perusahaan PT. GRUTI. Perubahan penting yang terjadi pada masyarakat Desa Sarah Teube terutama dalam bidang ekonomi. Orientasi ekonomi masyarakat mulai berubah dan seiring dengan itu, terjadi pula perubahan dalam bidang sosial dan budaya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube sebelum dan sesudah terjadinya konflik dan bagaimana dampak konflik politik yang terjadi terhadap mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube. Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube sebelum dan sesudah terjadinya konflik sehingga dapat menganalisis bagaimana dampak konflik politik yang terjadi terhadap mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Untuk pemilihan informan dilakukan secara *purposif sampling*. Setelah data diperoleh, data tersebut dianalisis guna menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube sebelum terjadinya konflik adalah sebagai karyawan di perusahaan PT. GRUTI. Namun saat terjadinya konflik politik di Aceh masyarakat Desa Sarah Teube merasa aktivitasnya terganggu terutama dalam aktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dengan situasi seperti ini masyarakat merasa tidak nyaman dalam bekerja dan memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Namun sebelum hal tersebut terwujud PT. GRUTI sendiri akhirnya ditutup dengan alasan semakin memanasnya konflik sehingga keamanan dalam berproduksi tidak menjamin, dan akhirnya perusahaan memberhentikan para karyawan-karyawannya. Masyarakat desa yang bekerja sebagai karyawan itu akhirnya mendapatkan mata pencaharian lain yaitu sebagai pembuat arang, nelayan, pekerja tambak udang, serta berladang dan bertani. Kesemuanya itu mereka lakukan agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dengan kondisi seperti sekarang ini jelas mereka semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka sehari-hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di kawasan paling ujung Pulau Sumatera Bagian Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Secara geografis, Provinsi Aceh berada di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka¹. Posisi geografis yang terletak di antara Selat Malaka dan Samudera Hindia ini memiliki nilai yang sangat strategis dari sudut geografis, politik, pertahanan dan ekonomi. Aceh juga mempunyai potensi alam yang banyak seperti minyak bumi, gas alam, batubara, kandungan emas, tembaga, dan lainnya serta mempunyai tanah yang subur sehingga cocok dengan pertanian dan perkebunan².

Suku bangsa Aceh merupakan hasil pembauran beberapa bangsa pendatang dengan beberapa suku bangsa asli di Sumatera, yaitu: dari Arab, India, Parsi, Turki, Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, Jawa dan lain-lain. Orang Aceh sendiri menyebut dirinya *Ureueng Aceh*³. Asimilasi suku bangsa Aceh dengan suku bangsa lain malah melahirkan suku bangsa baru, yaitu suku bangsa *Aneuk*

¹ <http://www.conflictanddevelopment.org>.

² <http://kagurahai.com>.

³ *Ureueng Aceh* artinya orang Aceh.

*Jame*⁴ dan Singkil. Daerah Aceh bisa juga dijuluki Serambi Mekkah, Tanah Rencong, dan Bumi Iskandar Muda (Hidayah, 1996: 3). Suku bangsa Aceh mendiami daerah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan sebagian di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Selatan dan Aceh Barat, serta di Kotamadya Sabang dan Banda.

Sejarah besar Aceh menjadi goresan tinta emas bagi dunia, Aceh adalah kejayaan dan *tamadun*⁵ tinggi yang dibangun sejak berabad-abad lampau. Masa-masa emas dari beberapa kerajaan Islam berdaulat, seperti Kerajaan Samudera Pasai yang kemudian digantikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, dengan pujangga-pujangga besar dan pelabuhan-pelabuhan dagangnya yang tersohor di Selat Malaka, jalur strategis perdagangan dunia (Nazar, 2008 : 1). Oleh karena itu, Aceh menjadi salah satu incaran daerah jajahan bagi negara-negara kapitalis demi memperebutkan dan menguasai segala potensi alam yang ada di bumi Rencong ini. Aceh sejak dulunya juga dikenal sebagai daerah yang terus dilanda konflik.

Pada tahun 2005 wilayah Aceh kembali menjadi perhatian dunia, seperti pernah terjadi selama beberapa tahun di tahun 1870-an. Jika orang Aceh dulunya pernah dianggap sebagai korban-korban agresi Belanda dan *Realpolitik*⁶ Inggris, maka saat ini orang-orang Aceh dianggap sebagai korban-korban tak berdosa akibat tsunami yang paling ganas dalam sejarah manusia. Selain itu sejak tahun 1990-an, mereka juga telah menjadi korban bersalah atau tidak bersalah akibat

⁴ *Aneuk Jame* artinya anak tamu.

⁵ *Tammadun* artinya Peradaban; kebudayaan; kemajuan.

⁶ *Realpolitik* merupakan aliran (paham) haluan politik yang segala hal hendak mendapat hasil yang nyata atau mengingat kenyataan-kenyataan.

perang di wilayah mereka, atas apa dan bagaimana Aceh harus tetap menjadi bagian dari Indonesia (Reid, 2005: vii).

Di negara Indonesia yang multietnis, kemungkinan terjadinya konflik selalu terbuka. Peristiwa ini terjadi karena negara didirikan atas kesadaran politik, yang tidak semata-mata merasa diri sebagai etnis terjajah, tetapi karena adanya persamaan visi bersama tentang masa depan bersama dan sejahtera bersama⁷. Di pihak lain, sejahtera bersama adalah sasaran akhir pendirian negara. Sejahtera bersama adalah tujuan negara sehingga sebuah negara yang tidak dapat menyajahterakan para warga negara merupakan suatu malapetaka dan suatu sumber konflik.

Konflik ini akan menghasilkan dua akibat. Akibat pertama adalah disintegrasi. Peristiwa ini dapat menimpa negara-negara yang multietnis seperti Indonesia. Apa yang telah terjadi di Timor Timur merupakan salah satu bukti dari kekalahan Indonesia, apa pun alasan yang dikemukakan di balik peristiwa itu. Akibat kedua adalah pergantian pemerintahan. Peristiwa ini biasanya terjadi pada negara-negara yang dibangun atas satu etnis tertentu, misalnya Israel. Jika terjadi konflik di negara seperti ini, yang berubah adalah sistem pemerintahan atau pemerintahannya, bukan suatu disintegrasi⁸.

Beberapa daerah yang bahkan kini mulai menyuarakan rasa ketidakadilan setelah 58 tahun hidup bersama tidak dapat semata-mata dilihat sebagai suatu tindakan subversif, suatu makar kepada pemerintah yang sah. Justru suara itu menjadi pertanda bahwa mereka mulai menggugat visi sejahtera bersama.

⁷ <http://know.brr.go.id/dc/articles>.

⁸ <http://know.brr.go.id/dc/artilces>.

Keinginan membangun sebuah bangsa baru berdasarkan kelompok etnis yang lebih kecil merupakan harapan baru manakala mereka merasa telah terjadi ketidakcocokan yang tidak dapat ditawarkan lagi antara mereka dengan negara.

Pergolakan di Aceh merupakan suatu konflik berkepanjangan sejak tahun 1953 hingga tahun 1959 yang di akhiri dengan ikrar *Lam Teh*⁹. Kemudian pergolakan muncul lagi yang dimulai tahun 1976 sampai akhirnya ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki¹⁰. Konflik tajam dalam mempertentangkan antara kekuasaan pusat dan kepentingan rakyat di daerah, misalnya dirasakan ketidakadilan dalam alokasi hasil kekayaan alam antar pusat dan daerah, tidak direalisasi janji untuk menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan daerah Syariat Islam. Konflik di Aceh tidak pernah disolusi secara tuntas dan bisa mewedahi aspirasi yang muncul dikalangan sebagian besar rakyat Aceh, sehingga efek dari akumulasi kekecewaan tersebut melahirkan gerakan yang separatis (Maulana, 2001 : 2).

Di Aceh, konflik timbul terutama karena ada rasa ketidakadilan. Menurut orang Aceh, provinsi mereka memiliki kandungan alam yang melimpah, tetapi hasil kandungan itu hanya sebagian kecil yang dapat dinikmati oleh mereka. Sebagian besar justru lari ke Pulau Jawa sehingga jika semula konflik itu hanya terbatas pada pemerintah tetapi lambat laun menjadi sentimen etnis dengan orang Jawa karena anggapan bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah Jawa¹¹.

⁹ *Lam Teh* artinya Dalam Teh.

¹⁰ <http://acehdamee.blogspot.com>.

¹¹ <http://know.brr.go.id/dc/artilces>.

Persoalan konflik politik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam pada masa sekarang ini merupakan persoalan intern negara Republik Indonesia karena dalam sebagian persepsi sebagian rakyat Aceh pihak pemerintah pusat selalu mengkhianati setiap kesepakatan yang telah dibuat (Maulana, 2001: 18). Hal tersebut dimulai dari awal kemerdekaan bahkan sampai sekarang. Bahkan lebih parah lagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dianggap dan diyakini oleh rakyat Aceh selalu merugikan kepentingan mereka. Padahal kekayaan yang ada di Aceh selalu dieksploitasi untuk kepentingan pemerintah pusat tetapi rakyat Aceh ditindas dan selalu diimintidasi.

Salah satu kesepakatan yang telah dikhianati pemerintah pusat adalah pada tahun 1947 pada saat Teungku Muhammad Daud Beureu-eh menerima janji Presiden Soekarno, kalau Indonesia merdeka akan dijadikan Negara Islam. Dengan itu beliau mengerahkan Mujahidin Aceh untuk membebaskan Indonesia dari serbuan Belanda. Namun, janji yang dikumandangkan hanya tinggal dalam kenangan. Soekarno yang berpaham Nasionalis Komunis bukan hanya sekedar tidak memenuhi janji tersebut, tetapi kemudian memimpin Indonesia dengan cara komunis anti Tuhan yang sangat dibenci Teungku Muhammad Daud Beureu-eh (Adan, 2007: 6).

Disamping itu ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antara pusat dan daerah selama ini juga telah menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Perlakuan tidak adil pemerintah pusat sampai sekarang telah berdampak luas terhadap kehidupan politik di Serambi Mekkah. Ketidakadilan selama ini telah mengakibatkan Aceh tertinggal dalam segala bidang. Kondisi ini

telah menimbulkan kerawanan ekonomi yang menumbuhkan gejolak sosial yang berakhir dengan pemberontakan baik pada masa Orde Lama dengan gerakan DI/TII tahun 1953 yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, maupun pada masa orde baru dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Kehidupan normal yang tidak bisa berjalan membuat rakyat Aceh diliputi rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akibat tidak adanya serta banyaknya kasus penculikan, pembantaian, penyiksaan, penangkapan dan penembakan. Kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh tidak berkembang, bahkan budaya-budaya setempat tidak diberi ruang untuk tumbuh. Rakyat tidak berani mengekspresikan diri walaupun dalam kehidupan kelompok. Walaupun sebutan Daerah Istimewa masih melekat namun hampir tidak ada lagi peranan yang bisa dimainkan oleh pemuka adat dan agama. Akibatnya Aceh pada masa Orde Baru selalu dalam suasana huru-hara, kritis bahkan konflik dan malapetaka yang berkepanjangan (Sudaryanto, 2007: 43-44).

Pembunuhan massal, perampokan, pemerkosaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh, sehingga menyebabkan Aceh diklaim sebagai Daerah Operasi Militer atau DOM. Perlakuan semasa DOM tahun 1989-1998 telah menimbulkan kuburan-kuburan massal di tiga Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur (Al-Chaidar, 1999: 215). Ketidakadilan dalam mengelola sumber daya alam dan faktor lainnya yang juga telah menimbulkan faktor yang memicu timbulnya berbagai konflik di Aceh. Dari segi ekonomi, gejolak sosial yang terjadi di Aceh lebih banyak disebabkan pemerintah menerapkan sentralistik. Tidak adanya penimbangan antara keuangan pemerintah

pusat dan daerah, telah menjadikan Aceh sebagai daerah miskin (Maulana, 2001 :19).

Perubahan tidak juga terjadi ketika ditemukan ladang gas di Arun, Aceh Utara yang kemudian diikuti dengan berdirinya industri besar seperti PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF), PT. Kraft Aceh dan sejumlah industri lainnya. Bila dipahami dan dipikirkan secara bijak seharusnya pemerintah layak berterima kasih kepada daerah Aceh. Pengolahan sumber daya alam di daerah lebih banyak memberikan kemakmuran kepada orang-orang luar daerah, masyarakat setempat lebih banyak jadi penonton. Rakyat Aceh menderita karena negerinya kaya, sehingga orang luar datang merampok kekayaan alam dan bumi Aceh dan menyingkirkan rakyat Aceh sebagai pemiliknya (Maulana, 2001:19).

Akibat dari konflik yang terjadi banyak penduduk di Aceh yang bukan suku bangsa Aceh pergi meninggalkan Aceh, khususnya orang Jawa yang mengungsi dan meninggalkan wilayah Aceh karena tidak tahan akan intimidasi dan takut apabila terus menerus tinggal di wilayah yang di anggap rawan konflik¹².

Tidak hanya sampai di situ, kondisi ini semakin parah setelah pecahnya konflik pada akhir 1990-an hingga awal tahun 2000-an banyak pabrik yang tidak beroperasi lagi dan kemudian ditutup total. Diantaranya adalah PT Gunung Raya Timber Industries (GRUTI) dan pelabuhannya di Desa Sarah Teube, PT Aceh Plywood Prima Indonesia (API) yang mampu meraup ribuan tenaga kerja juga memecat karyawannya secara massal.

¹² <http://www.kotalangsa.blogspot.com>.

Pada saat itu PT. GRUTI sendiri yang memiliki sekitar 2317 orang tenaga kerja dengan terpaksa memberhentikan atau mem-PHK 90% dari jumlah karyawannya. Kemudian pihak perusahaan hanya menyisakan 10% dari karyawan yang dipercaya untuk ditugaskan menjaga semua aset-aset perusahaan, baik itu mesin-mesin produksi serta sarana dan prasarana lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan kayu balok untuk diproduksi dan banyaknya para pekerja yang memutuskan meninggalkan Aceh untuk mengungsi. Kondisi seperti ini juga disebabkan oleh semakin diperparahnya konflik politik yang terjadi sehingga membuat para karyawan terganggu dalam bekerja. Dengan terjadinya kondisi yang semacam ini akan sangat berpengaruh terhadap perubahan mata pencaharian pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sarah Teube yang bekerja di perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai dampak konflik politik terhadap mata pencaharian masyarakat Aceh yang berpengaruh terhadap perubahan pada komponen mata pencaharian masyarakat. Dirasa masih sangat terbatas dan perlu diteliti lebih lanjut. Mengenai mengapa penulis ingin melihat lebih lanjut aspek mata pencaharian hidup masyarakat alasannya adalah karena bagaimana pun aspek mata pencaharian hidup bisa menentukan tingkat kehidupan dibidang ekonomi dan bisa mempengaruhi bidang-bidang lain seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

B. Permasalahan

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, konflik di Aceh merupakan salah satu pertentangan rakyat Aceh yang terorganisir dalam suatu

wadah yang dinamai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimulai sejak tahun 1976 sampai pada akhirnya ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MuO) antara Pemerintahan RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Rakyat Aceh menuntut berpisah dan Merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terjadinya konflik di Aceh mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar kawasan Aceh Timur pada saat itu bangkrut dan terpaksa memecat karyawannya secara massal. Hal ini berpengaruh terhadap warga Desa Sarah Teube yang pada saat itu hampir dari 100 orang warganya yang bekerja sebagai karyawan di Perusahaan PT. GRUTI tersebut kemudian berhenti bekerja dan beralih ke mata pencaharian yang lainnya. Dengan demikian terjadinya konflik yang terjadi di Aceh telah membawa perubahan-perubahan pada masyarakat Desa Sarah Teube khususnya dalam bidang mata pencaharian.

Berdasarkan uraian di atas terhadap fenomena yang terjadi dengan terjadinya konflik di Aceh yang membawa berbagai perubahan pada mata pencaharian masyarakat dapat kita munculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube sebelum dan sesudah terjadinya konflik?
2. Bagaimana dampak konflik politik yang terjadi terhadap mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube sebelum dan sesudah terjadinya konflik.
2. Menganalisis bagaimana dampak konflik politik yang terjadi terhadap mata pencaharian masyarakat Desa Sarah Teube.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik politik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam telah mengakibatkan berbagai macam perubahan. Diantaranya adalah perubahan yang terjadi pada Masyarakat Desa Sarah Teube yang sebelumnya mereka bekerja di perusahaan PT. GRUTI sebagai karyawan. Karena merasa aktivitasnya terganggu dan sampai-sampai mengancam keselamatan dan keluarga, akhirnya masyarakat Desa Sarah Teube tersebut berniat untuk mencari solusi dan mencari pekerjaan yang dianggap lebih aman. Namun sebelum kesemuanya terjadi, PT. GRUTI tempat mereka bekerja akhirnya memutuskan untuk berhenti berproduksi dengan alasan keamanan tidak menjamin karena konflik politik yang terjadi.

Saat ini mereka telah berubah mata pencaharian dan kemudian bekerja sebagai petani dan peladang, pembuat arang, nelayan dan pekerja tambak udang. Perubahan mata pencaharian tersebut berdampak terhadap penurunan taraf kehidupan ekonomi mereka. Dimana penurunan perekonomian mereka tersebut dapat terlihat dengan susahny mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi jelas di usia mereka yang semakin tua dan kebutuhan yang meningkat mereka mengaku kewalahan dan bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

Selain menghadapi situasi ekonomi yang sulit seperti saat sekarang ini, mereka umumnya juga terbebani dengan kondisi usia mereka yang semakin menua dan anak-anak mereka juga semakin dewasa. Sedikit beruntung bagi

mereka yang mempunyai anak dan saat ini telah bisa membantu mereka dalam menopang kebutuhan keluarga. Namun mereka harus merelakan sebagian dari anak-anak mereka harus kehilangan masa-masa bahagia anak-anaknya karena harus membantu bekerja dan tidak seperti anak-anak yang lainnya.

Di satu sisi terjadinya konflik politik di Aceh telah membawa dampak yang positif bagi masyarakat Aceh. Dampak itu diantaranya dengan terjadinya konflik politik telah membuat Otonomi Daerah yang berarti pemerintah daerah Aceh berhak mengatur ekonominya sendiri. Selain itu dampaknya juga terlihat dengan semakin tegarnya masyarakat menghadapi hidup dan tumbuhnya kesadaran bagi masyarakat Aceh yang lebih meningkatkan minat serta memotifasi anak-anak mereka dalam hal pendidikan.

Di sisi lain terjadinya konflik politik juga memberikan dampak yang negatif diantaranya terjadinya gangguan kejiwaan dan trauma sehingga membuat masyarakat saat ini masih dicekam oleh rasa takut yang berlebihan walaupun status daerah Aceh telah aman.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian tentang Dampak konflik politik terhadap mata pencaharian di Desa Sarah Teube Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka peneliti memberikan saran yang nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan desa Sarah Teube. Adapun saran-sarannya antara lain:

- a. Masyarakat desa Sarah Teube Harus dapat mengembangkan usahanya dan modal dari hasil pekerjaan dan perdagangan hendaknya digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti meningkatkan investasi dan modal usaha.
- b. Masyarakat desa Sarah Teube juga harus dapat meningkatkan standart pendidikan bagi anak-anaknya yang masih sekolah agar anak-anak mereka tidak lagi merasakan betapa susahny mencari uang seperti apa yang telah mereka rasakan saat ini.
- c. Bagi pihak pemerintah sebaiknya juga memeperhatikan dan mempertimbangkan akan kesejahteraan penduduk agar tidak lagi terjadi konflik politik tersebut. Karena dengan terjadinya konflik politik tersebut dapat membawa dampak yang sangat negatif bagi kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat Aceh itu sendiri.
- d. Hendaknya penelitian tentang Dampak Konflik Politik Terhadap Mata Pencaharian ini dilanjutkan kembali oleh peneliti berikutnya karena dalam penelitian ini hanya sebagian kecil yang dibahas dari sekian banyak unsur-unsur yang dapat diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, 2003. *Dampak Pindahan Penduduk Akibat Pembangunan PLTA Koto Panjang Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat*, Skripsi, Unand, Padang.
- Anwar, Desy, 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.
- Anwar, Dewi F. 2005. *Konflik Kekerasan Internal*, Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chaidar, Al, 1999. *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Madani Prees, Jakarta.
- Gazalba, Sidi, 1983. *Islam Dan Perubahan Sosiobudaya*, Pustaka Alhusna, Jakarta Pusat.
- Hidayah, Zulyani, 1996. *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1984. *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Lauer, H. Robert, 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manase, Malo, 1984. *Metode Penelitian Sosial*, Krinika, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maulana, Muhammad, 2001. *Pengaruh Konflik Politik Terhadap Siosoreligi Masyarakat Aceh Barat*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Nazar, Muhammad, 2008. *Sejarah Konflik Aceh*, Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Nasution, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik*, Gramedia, Jakarta.
- Poloma dalam Soetomo, 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Reid, Anthony, 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soeparlan, Parsudi, 2004. *Hubungan Antar-Sukubangsa*, YPKIK, Jakarta.

Soetomo, 1995. *Masalah Sosial Dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta.

Sudaryanto, Agus, 2007. *Dinamika Hukum Adat Dan Agama Di Aceh*, Adnin Foundation Aceh, Ar-Raniry Press, Banda Aceh.

Yusuf Adan, Hasanuddin, 2007. *Teungku Muhammad Daud Beureu-eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Adnin Foundation Aceh, Ar-Raniry Press, Banda Aceh.

<http://www.conflictanddevelopment.org> (Sabtu, 20 Februari 2010).

<http://www.kotalangsa.blogspot.com>. (Sabtu, 20 Februari 2010).

<http://acehdamee.blogspot.com>. (Senin, 4 April 2010).

<http://know.brr.go.id/dc/articles>. (Kamis, 18 Maret 2010).

<http://kagurahai.com>. (Sabtu, 20 Februari 2010).

<http://pusatperdamaian.com>. (Selasa, 8 Juni 2010).